

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, 2006).
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008).
- , *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- , *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2007).
- Collin, P.H., *Dictionary Of Law: Third Edition*, (London: Peter Collin Publishing, 2000)
- Crowther, Jonathan (editor), *Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, 1995)*.
- Curzon, L.B., *Dictionary Of Law: Fifth Edition*, (Great Britain: Pitman Publishing, 1998)
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, (United States of America: West Group ST. Paul Minn, 2000)

- Hadiatmodjo, Soewarno, *Teori-Teori Politik Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Bina cipta, 1981).
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Hamid, Zulkifly, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Harmaily Ibrahim, dan Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FHUI, 1983).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Lailam, Tanto, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Media Prudent, 2012).
- Lipset, Seymour Martin, *Pengantar* untuk edisi bahasa Inggris, dalam Robert Michels, *Partai Politik Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, DPR dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Martin, Elizabeth A., *Oxford Dictionary of Law: Third Edition*, (New York: Oxford University Press, 2000)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara (pasca amandemen konstitusi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mukthie Fadjar , Abdul, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012)

- Neta, Yulia, *Ilmu Negara*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2009).
- Salang, Sebastian, *et all, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2009).
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007).
- Sugeng, Bob dan Christoph Schuck, *Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000).
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Jogjakarta: Liberty, 2000).
- Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In-Trans Publishing, 2009).
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Indo Hill Co, 1961).

B.PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 1966 Nomor 38, TLNRI 2813).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (LNRI Tahun 1975 Nomor 32, TLNRI Nomor 3062).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 1969 Nomor 59, TLNRI Nomor 2915).

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 1999 Nomor 22, TLNRI Nomor 3809).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 1999 Nomor 23, TLNRI Nomor 3810).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 24, TLNRI 3811).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2002 Nomor 138, TLNRI Nomor 4251).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4936).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2011 Nomor 8, TLNRI Nomor 5189).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (LNRI Tahun 2009 Nomor 123, TLNRI Nomor 5043).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (LNRI Tahun 2012 Nomor 117, TLNRI Nomor 5316).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 008/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Serta UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.22-24/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.38/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Jurnal

Neta, Yulia, *Fungsi Partai Politik dalam Pemilihan Umum yang Demokratis*, (Jakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011).

Assiddiqie, Jimly, *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*, dalam jurnal konstitusi Volume 3 Nomor 4 Desember 2006, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Shubhan, M. Hadi, *Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol*, dalam jurnal konstitusi Volume 3 Nomor 4 Desember 2006, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Salang, Sebastian, *Parlemen: Antara Kepentingan Politik vs Aspirasi Rakyat*, dalam jurnal konstitusi Volume 3 Nomor 4 Desember 2006, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

D. Internet

<http://appehutaaruk.blogspot.com/2010/05/politik-dalam-teori.html> diakses tanggal 6 mei 2012 pada pukul 0.20.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 2 juni pukul 17.30.

<http://kamusbahasaindonesia.org/politik/mirip> diakses pada tanggal 2 Juni 2012 pukul 10.31.

<http://www.artikata.com/arti-330543-implikasi.html> diakses pada tanggal 2 juni 2012 pukul 17.00.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diakses pada tanggal 3 Januari 2013 pukul 20.50.

<http://www.ipu.org/hr-e/162/ids10.htm> diakses pada tanggal 2 Januari 2013 pukul 15.30.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie diakses pada tanggal 1 Januari 2013 pukul 13.30.

<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2006/11/28/23278/Djoko-Edhi-Beberkan-> diakses pada tanggal 15 Desember 2012 pukul 13.08.

<http://www.abdulghoffar.com/2012/01/sesat-recall-partai.html> diakses pada tanggal 27 November 2012 pukul 09.07.